

PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG BERKELANJUTAN

Sultan Djibe

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi dari waktu ke waktu, permasalahan kemiskinan hari ini merupakan rentetan permasalahan yang telah terjadi pada masa yang lalu dan tetap saja akan terjadi pada masa-masa yang akan datang meskipun dengan tingkat permasalahan yang berbeda. Diharapkan masalah kemiskinan yang terjadi pada generasi saat ini tidak akan terjadi dan menjadi beban pada generasi yang akan datang. Harapannya bahwa semakin ke depan kemiskinan akan terus dapat berkurang baik dari jumlahnya maupun aspek permasalahannya, dan hal ini akan sangat tergantung pada strategi intervensi yang dilakukan. Upaya praktis yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran kritis dan perilaku prososial, penanggulangan kemiskinan berbasis pemetaan dan penguatan kelembagaan

Kata Kunci: Kemiskinan, keberlanjutan

A. Pendahuluan

Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang masih miskin sekira 30,02 juta jiwa. Angka ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Maret 2011 berdasarkan perhitungan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan baik makanan maupun non makanan. Secara makro menghitung angka garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum makanan disetarakan dengan 2100 kilo kalori perhari yang dilihat dari sekira 52 jenis komoditi. Sedangkan untuk non makanan seperti sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan berdasarkan kebutuhan minimumnya yang dilihat dari 51 jenis komoditi non makanan untuk wilayah perkotaan, dan sekira 47 jenis komoditi non makanan untuk wilayah pedesaan.

Mungkin tidak terlalu penting untuk memahami secara detail kronologis perhitungan

secara statistik matematis yang telah dilakukan oleh BPS sehingga angka 30,02 juta jiwa tersebut muncul. Akan tetapi yang lebih penting adalah memahami dan memikirkan secara bersama-sama mengapa angka sebesar itu masih juga ada. Meskipun terjadi perubahan penurunan angka kemiskinan dari waktu ke waktu tetapi angka tersebut masih tergolong cukup tinggi untuk ukuran Negara Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik yang ada dalam perut bumi maupun yang ada dipermukaan bumi termasuk sumber daya kelautan atau perairan lainnya.

Memang secara makro bahwa angka tersebut hanya sekitar 12,49% dari jumlah penduduk Indonesia yang ada. Dan kita tidak bisa lagi membiasakan diri untuk selalu terbuai dan terhipnotis oleh tinggi rendahnya angka-angka capaian secara kuantitatif. Karena permasalahan pokoknya bukan pada angka-



angkanya akan tetapi sejauh mana angka-angka tersebut berkorelasi positif dengan nilai realitas yang terjadi di komunitas. Idealnya bahwa ketika anggaran pendidikan 20% dari alokasi APBN seharusnya tidak ada lagi sarana pendidikan yang tidak layak pakai. Ketika terjadi over stock pangan seharusnya tidak ada lagi bayi dan ibu menyusui yang mengalami gizi buruk. Ketika pendidikan digratiskan, seharusnya tidak ada lagi warga komunitas yang putus sekolah hanya karena banyaknya pungutan biaya tertentu yang mereka harus bayar. Demikian pula pada saat kesehatan digratiskan seharusnya tidak ada lagi warga yang mengharapkan bantuan orang lain untuk membiayai biaya pengobatannya atau tidak ada lagi warga miskin yang nekad bunuh diri karena ketidak mampuan membayar biaya pengobatan rumah sakit.

Gambaran tersebut menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tapi dimensi yang paling pokok adalah bagaimana tingkat kedalaman dan keparahan dari kondisi kemiskinan itu sendiri. Angka yang rendah belum tentu mencerminkan rendahnya pula tingkat kedalaman dan keparahan kondisi kemiskinan yang terjadi di komunitas. Selain kita dituntut harus mampu menurunkan dan memperkecil angka kemiskinan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa permasalahan pokoknya adalah bagaimana mencapai angka-angka yang ada dan angka tersebut memang menjadi gambaran realitas yang terjadi di komunitas.

B. Pembahasan

U n t u k m e n d o r o n g p e m e c a h a n permasalahan tersebut secara berkelanjutan maka semua pihak pemangku kepentingan berkewajiban melakukan kegiatan yang proaktif terhadap permasalahan kemiskinan. Dalam rangka menopang keberlanjutan penanganan masalah kemiskinan maka ada beberapa

langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menumbuhkan Kesadaran Kritis dan Prilaku Prososial

Kesadaran kritis mengacu pada pemahaman seseorang atau lembaga terhadap realitas diri dan lingkungannya. Sementara prilaku pro sosial adalah prilaku seseorang atau kelompok orang yang selalu memberikan respon terhadap permasalahan dengan positive feeling seperti rasa empati sehingga secara internal selalu muncul tindakan untuk menolong orang lain.

Kaitannya dengan kedua aspek mendasar tersebut maka untuk meningkatkan angka kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan dan tingkat keparahan serta kedalamannya disemua aspek kehidupan komunitas, maka baik individu maupun kelembagaan dibutuhkan adanya sikap kritis dan kepedulian terhadap permasalahan sosial (pro sosial) khususnya masalah kemiskinan. Dari sisi amanah undang-undang dasar maupun amanah rakyat maka pemerintah baik secara individu maupun lembaganya memiliki kewajiban untuk menumbuhkan daya kritis dan pro sosial terhadap masalah kemiskinan. Salah satu wujud yang telah dilakukan dalam rangka merespon permasalahan kemiskinan yang terjadi, yaitu secara nasional oleh pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang secara hirarki dan struktur kelembagaannya sampai ke tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Bahkan pemerintah telah meluncurkan beberapa program yang diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan angka dan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Secara implementatif dalam rangka secara terus menerus mengurangi angka kemiskinan secara ril oleh pemerintah telah melakukan pendekatan program dengan tiga kelompok/klaster yaitu ;

a . Kelompok program bantuan dan perlindungan sosial terpadu yang berbasis pada keluarga yang bertujuan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran dan perbaikan kualitas hidup warga miskin melalui program Raskin, Jamkesmas, PKH dan Beasiswa Miskin,

1) Program Keluarga Harapan ; Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada RTSM, dengan syarat bahwa RTSM yang bersangkutan harus memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai K/L lain seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan Nasional; Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT Pos Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. PKH diharapkan bermanfaat untuk:

a) Dalam jangka pendek, memberikan pengaruh pada pendapatan rumah tangga miskin (*income effect*) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

b) Dalam jangka panjang, memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui ; Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin). Memberikan kepastian kepada anak menyangkut masa depannya (*insurance effect*).

c) Merubah perilaku keluarga miskin agar memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anak mereka.

d) Mengurangi jumlah pekerja anak.

e) Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender).

2) Program Jaminan Kesehatan Komunitas (Jamkesmas)

Program Jaminan Kesehatan Komunitas (Jamkesmas) adalah program asuransi kesehatan untuk warga Indonesia. Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2004. Pada tahun 2009 program ini mendanai biaya kesehatan bagi 76,4 juta penduduk, termasuk di dalamnya sekitar 2,6 juta anak terlantar, penghuni panti jompo, tunawisma dan penduduk yang tidak memiliki KTP.

3) Program Beras Miskin (Raskin)

Program Raskin adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan, dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini merupakan kelanjutan Program Operasi Pasar Khusus yang diluncurkan pada bulan Juli tahun 1998.

4) Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin

Tujuan program beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin adalah untuk mendukung rintisan wajib belajar 9 tahun dan program pendidikan untuk semua. Secara lebih spesifik, tujuan dari program ini adalah untuk membantu keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan. Beasiswa ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anak usia 7 - 18 tahun untuk memperoleh akses terhadap pelayanan pendidikan.

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan komunitas seperti PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pedesaan dan beberapa program lainnya yang bernaung dalam PNPM Mandiri. Secara umum PNPM Mandiri adalah program pembangunan berbasis komunitas atau Community-Driven Development. Karakteristik pendekatan ini adalah (i) Komunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumber daya yang digunakan; (ii) Komunitas miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan mitra) dalam proses pengambilan keputusan; dan (iii) pemberdayaan terjadi pada saat komunitas berinteraksi secara saling menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial. Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja penduduk miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya antara lain adalah: Meningkatkan partisipasi seluruh komunitas termasuk penduduk miskin, kelompok perempuan, dan kelompok lainnya yang selama ini terpinggirkan; Meningkatkan kapasitas kelembagaan komunitas; Meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam pelayanan komunitas terutama komunitas miskin. Menciptakan sinergi komunitas, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, organisasi komunitas, dan kelompok peduli lainnya; Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian komunitas; Meningkatkan modal sosial komunitas; Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi.

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kelompok program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil bertujuan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Program nasional yang termasuk dalam program

ini adalah Kredit Usaha Rakyat. Tujuan program Kredit Usaha Rakyat adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama, pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha bertindak. Sedangkan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin berfungsi sebagai bank penyalur kredit. Namun ada beberapa tantangan yang umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan program KUR: Pertama, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyerapan kredit oleh usaha mikro dan kecil. Penyerapan KUR hingga Desember 2010 masih dapat ditingkatkan. Dari total plafon KUR sebesar Rp. 17,23 triliun, masih sekitar 46,7 % atau sekitar Rp. 8,05 triliun yang terserap. Total debitur yang memperoleh KUR adalah 1.437.650 unit usaha. Kedua, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit ke berbagai sektor yang potensial. Sektor-sektor potensial seperti sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang berpotensi untuk peningkatan penyaluran kredit. Hingga Desember 2010 alokasi pembiayaan disektor pertanian sebesar 17,1 % (Rp. 2,99 triliun); dan sektor industri pengolahan 2,3 % (Rp. 453,65 miliar). Sedangkan sektor yang memperoleh alokasi pembiayaan cukup dominan ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran 63,7 % dari total alokasi sebesar Rp. 10 triliun. Peran TKPKD

dalam melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa K/L terkait

Tiga kelompok program tersebut memberikan gambaran sepintas pada level pemerintah bahwa kebijakan yang dilakukan mencerminkan adanya kepedulian terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi di komunitas. Gambaran sepintas yang dimaksud bahwa dari sisi kebijakan sudah nampak adanya kepedulian meskipun dari sisi niat dan motivasi masih perlu didiskusikan. Tidak sedikit implementasi kebijakan tersebut yang dilakukan selalu berparadigma ganda dan multi tafsir, sehingga unsur kepedulian terhadap persoalan kemiskinan menjadi bias dan tidak murni. Misalnya persoalan politik yang mementingkan diri dan kelompok untuk mempertahankan posisi menjadi sangat kental dalam setiap pengambilan kebijakan, itu terlihat ketika terjadi tarik menarik antara kelompok pengambil kebijakan terhadap suatu rumusan kebijakan. Bahkan yang sangat ironis bahwa implementasi kebijakan bukannya menjadi instrumen untuk berempati terhadap persoalan kemiskinan yang dialami oleh komunitas, tapi yang terjadi sebaliknya justru menjadi instrumen untuk menarik simpati komunitas dalam rangka melanggengkan posisi dan kekuasaan. Olehnya itu kesadaran yang perlu dibangun pada level pemerintah, bahwa secara kelembagaan pemerintah memang merupakan suatu pihak yang harus memberikan pelayanan kekomunitas bukan justru menjadi pelayan kekuasaan. Pemberian pelayanan sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan kemiskinan, akan terukur dari seberapa banyak produk regulasi (undang-undang, pepres, kepmen, perda dll) yang khusus mendorong pencapaian kesejahteraan komunitas miskin dan seberapa besar anggaran yang disiapkan khusus untuk itu

Mendorong kesadaran kritis dan perilaku prososial sangat penting pula dilakukan dikelompok komunitas. Kemiskinan dengan segala dimensinya ada dan terjadi dilevel komunitas sehingga komunitas perlu memahami apa yang menyebabkan sehingga mereka miskin. Secara internal bahwa seseorang menjadi miskin karena ada faktor kemalasan bekerja dan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki agar bisa berkembang. Selalu mengharapkan bantuan belas kasihan dari keluarga dan orang lain. Dan secara eksternal bahwa memang ada juga faktor diluar diri seseorang yang berpengaruh sehingga bisa menjadi miskin, seperti sistem politik yang hanya mementingkan kelompok dan koleganya, sistem ekonomi yang masih konglomerasi, sistem budaya yang masih paternalistik, sistem pendidikan yang berorientasi profit. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan semakin tertutupnya peluang kelompok komunitas kecil/miskin untuk mengakses sumber-sumber daya yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik. Setiap warga komunitas perlu sadar bahwa bermalas-malasan dan tidak peduli terhadap setiap permasalahan yang ada merupakan awal hancurnya suatu rancangan bangunan kesejahteraan hidup yang senantiasa semua orang harapkan. Komunitas sebagai warga Negara juga perlu sadar bahwa kedaulatan Negara ada pada rakyat sehingga setiap kebijakan yang hanya mengeksploitasi kondisi kemiskinan yang dialami perlu dikoreksi kalau perlu ditentang. Komunitas tidak lagi selalu menjadi obyek pembangunan akan tetapi perlu diberikan peluang untuk terlibat setiap level perumusan kebijakan.

2. Penanggulangan Berbasis Pemetaan

Menangani permasalahan kemiskinan semestinya tidak bersifat tiba-tiba atau bersifat sporadis dan bagi-bagi uang langsung selesai seperti yang telah banyak dilakukan selama ini. Permasalahan kemiskinan

bukanlah persoalan yang berdiri tunggal tapi merupakan masalah yang multi dimensi dan banyak variabel yang saling kait mengait. Kemiskinan tidak hanya sebatas kekurangan pendapatan secara ekonomi saja, tetapi kemiskinan adalah masalah kerentanan, aksesibilitas, kelemahan fisik bahkan ketidakberdayaan.

Untuk mengatasi permasalahan ini secara tepat dan sesuai dengan sasaran maka langkah strategis yang perlu dilakukan adalah proses pemetaan dan identifikasi secara holistic dan integratif segala potensi, masalah, serta solusi yang akan dilakukan. Dengan peta diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang berbagai ciri dan karakteristik yang melekat pada diri warga atau keluarga miskin. Dari sisi ekonomi akan terjelaskan bagaimana pola-pola sumber pendapatan yang dilakukan oleh warga miskin, pola konsumsi dan tingkat pengeluarannya, jumlah beban dan tanggungan dalam suatu rumah tangga miskin serta alokasi pengeluaran lainnya. Kemudian dari aspek sosial bahwa dengan peta akan memberikan gambaran bagaimana tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih, sanitasi lingkungannya serta tingkat keamanan lingkungan sosialnya. Secara demografi kita akan mengetahui bagaimana komposisi umur penduduk miskin disuatu wilayah, jumlah penduduk miskin yang berstatus janda atau duda dan secara geografi penyebaran dan konsentrasinya warga miskin baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan dapat diketahui melalui peta yang ada.

Untuk aspek praktis implementatif bahwa dengan hasil pemetaan yang ada memudahkan setiap kelompok atau pihak tertentu yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk menentukan target (waktu, kelompok sasaran, biaya) dalam rangka penyelesaian sumber-sumber permasalahan kemiskinan. Sementara dari sisi pengetahuan bahwa kegiatan dan cara melakukan pemetaan

perlu dipahami oleh semua pihak terutama oleh komunitas miskin itu sendiri. Hal ini penting karena dengan melakukan pemetaan sendiri maka secara tidak langsung bahwa telah terjadi proses penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dari dalam komunitas itu sendiri dan hal tersebut dapat berkelanjutan jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pihak luar.

Mengetahui dan menganalisis kondisi kemiskinan yang berbasis pada pemetaan akan lebih efektif jika hanya difokuskan pada beberapa bidang tertentu. Misalnya dalam konteks analisis di tingkat daerah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lingkup bidang analisis tersebut adalah: Prioritas kebijakan pembangunan, khususnya yang dinyatakan oleh RPJM dan RPJP Nasional dan RPJM Daerah. Anggaran Pemerintah secara keseluruhan untuk penanggulangan kemiskinan. Target pengurangan kemiskinan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Analisis pemetaan yang dilakukan perlu menentukan indikator utama dan indikator pendukung. Indikator utama meliputi gambaran capaian (outcome) penanggulangan kemiskinan. Umumnya, indikator ini mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program penanggulangan kemiskinan. Sementara indikator pendukung menggambarkan adanya determinan (faktor terkait) dari capaian indikator utama disebut sebagai indikator pendukung. Sehingga indikator pendukung merupakan indikator yang dapat diintervensi oleh kebijakan untuk menghasilkan perbaikan kondisi indikator utama. Untuk setiap bidang, indikator pendukung harus dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan kondisi riil yang ada di komunitas.

Sehingga dalam jangka waktu tertentu, akan dapat menghasilkan beberapa kemungkinan situasi dan kondisi komunitas, yaitu: jika terjadi tingkat kemajuan capaian

indikator di daerah lebih besar daripada tingkat kemajuan yang terjadi pada level provinsi atau nasional, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi atau nasional. Kemudian hal lain bahwa jika terjadi tingkat kemajuan capaian indikator di daerah sama dengan tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi atau nasional maka hal ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator di daerah relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi atau nasional. Demikian pula jika tingkat kemajuan capaian indikator di daerah lebih kecil daripada tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi atau nasional, maka perkembangan capaian indikator di daerah cukup relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi atau nasional. Jika capaian indikator di daerah mengalami kemunduran ketika capaian tersebut mengalami kemajuan secara provinsi atau nasional, maka kemunduran capaian indikator di daerah tidak relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi atau nasional. Dan jika capaian indikator di daerah mengalami kemajuan ketika capaian tersebut mengalami kemunduran secara provinsi atau nasional, ini menunjukkan bahwa kemajuan capaian indikator di daerah tidak relevan terhadap kemunduran capaian indikator di tingkat provinsi atau nasional.

3. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksudkan adalah aturan, norma atau nilai yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dan berpotensi mendorong penyelesaian masalah kemiskinan. Aturan, norma dan nilai ada yang tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain. Ada juga yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kebiasaan yang berdasarkan tata nilai yang dilakukan secara turun temurun. Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipisahkan bahkan sangat erat kaitannya dengan kelembagaan yang

dimaksud. Asumsinya bahwa semakin kuat kelembagaan yang ada maka semakin kecil untuk terjadinya permasalahan kemiskinan ditingkat komunitas, demikian pula sebaliknya bahwa semakin lemah kelembagaan yang ada maka semakin besar permasalahan kemiskinan yang akan terjadi.

Asumsi tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa kasus yang terjadi pada aturan-aturan dan kebijakan yang ada pada level pemerintah. Misalnya pada Tahun 2010 terbit Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Di tingkat Nasional Tim percepatan dipimpin oleh Wapres, untuk level Provinsi ketuanya Wakil Gubernur dan Kabupaten/Kota ketuanya Wakil Walikota/Bupati. Salah satu tugas dan fungsi tim tersebut adalah melakukan sinergitas dan monitoring serta evaluasi terhadap semua program yang ada diwilayahnya. Tugas dan fungsi ini bisa dipastikan bahwa belum berjalan secara optimal. Indikatornya bahwa masih banyak daerah yang belum merumuskan rencana kerja kelembagaannya sesuai dengan tupoksinya, seperti melakukan pertemuan atau rapat koordinasi rutin, melakukan kunjungan lapangan/monitoring kegiatan. Tugas dan fungsi yang lain yang belum berjalan adalah mendorong a d a n y a s u a t u s t r a t e g i p e r c e p a t a n penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat dicermati dengan masih banyaknya daerah yang belum memiliki dokumen khusus strategi penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dari RPJMD masing-masing. Akibatnya adalah banyak kegiatan yang tumpang tindih antara program daerah melalui SKPD dengan dana APBD dan program yang lain yang bersumber dari dana APBN ataupun dana yang lain dan ini dapat menghambat laju percepatan penanggulangan kemiskinan. Beberapa indikator tersebut semakin memberikan kejelasan bahwa betapa rapuhnya kelembagaan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dengan tidak terjabarkannya

beberapa tupoksi yang seharusnya diimplementasikan di komunitas.

Di level komunitas secara keseluruhan juga perlu dilakukan penguatan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang saat ini mengalami pergeseran. Jalinan hubungan sosial sudah sangat transaksional, yang melihat keuntungan dan kerugian suatu hubungan yang dibangun. Tegur sapa dan saling peduli sesama tetangga menjadi perilaku yang langka. Saling tipu, pengaburan makna antara hak dan kewajiban, pemakluman terhadap perilaku yang melanggar nilai-nilai luhur kemanusiaan menjadi hal yang lumrah dan tidak tabu lagi dalam komunitas. Hal tersebut merupakan sebagian gambaran bahwa kepedulian, keadilan, kepercayaan dan kejujuran dan lain-lainnya sudah tercabut dari akar setiap aktifitas kehidupan sosial komunitas. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka yang akan terjadi bukan penyelesaian masalah kemiskinan, tetapi justru akan melanggengkan dan mengokohkan bangunan ketimpangan sosial yang mengakibatkan kemiskinan.

C. Penutup

Sebagai upaya menjauhkan diri dari kemiskinan dan mendekatkan diri ke kesejahteraan, maka pilihan yang paling tepat dan berorientasi kedepan adalah menanam dan menumbuhkan kembali benih-benih kepedulian, keadilan, kejujuran dan saling percaya, keberpihakan pada masalah

kemiskinan yang sudah tercabut dari akar kehidupan. Untuk mewujudkan itu, salah satu pilihannya adalah melakukan usaha-usaha pemberdayaan pada semua komponen bangsa. Karena bangsa yang berdaya adalah bangsa yang memahami dan mampu menyelesaikan masalahnya khususnya masalah kemiskinan di atas landasan nilai-nilai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Djohani, Riningsih dkk (editor) 2007, Berbuat

Bersama, Berperan Setara, Bandung.

E r a n i Y u s t i k a , A h k m a d , D R . 2 0 0 7

Perekonomian Indonesia (Satu Decade Pasca Krisis Indonesia), BPFE, Universitas Brawijaya, Malang.

Moeliono, Ilya (dkk), 2003, Memadu Ke p e n t i n g a n , M e m e n a n g k a n Kehidupan, Studio Driya Media, Bandung.

Panduan Penanggulangan Kemiskinan. 2011, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, 2010, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, 2010.

Badan Pusat Statistik Nasional, Jakarta, 2011

